



**BUPATI  
TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA  
TIMUR**

*RANCANGAN*

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK

NOMOR **XX** TAHUN 2023  
TENTANG

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** :
- bahwa penyandang disabilitas sebagai pihak yang rentan dan terbelakang karena masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesamaan hak, kesempatan dan menjamin kelangsungan kehidupan bagi penyandang disabilitas untuk hidup dan berkembang secara adil dan merata tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
  - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1)

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 234, Tamabahan Lemabaran Negara RI Nomor 6566);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2020

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Tentang Layanan Habilitasi dan rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6601);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.
12. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

15. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi.
21. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
23. Perlindungan sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

disebut perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

24. Jaminan sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Lembaga di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
26. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Komisi disabilitas daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dibentuk dan bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala dinas.
28. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
29. Lembaga penyelenggara pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
30. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

32. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
33. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
34. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
35. Unit layanan disabilitas dapat dilakukan oleh semua OPD sesuai dengan urusan OPD masing-masing.
36. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. ragam penyandang disabilitas;
- c. hak penyandang disabilitas;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



- d. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. pengarusutamaan penyandang disabilitas;
- g. koordinasi;
- h. komisi disabilitas daerah;
- i. penghargaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administratif;
- m. larangan;
- n. penyidikan;
- o. ketentuan lain-lain;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. ketentuan penutup.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 3

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara di daerah;
- b. menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas di daerah;
- c. mewujudkan upaya peningkatan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di daerah;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

## BAB III

### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

Ragam penyandang disabilitas, meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang disabilitas sensorik.

#### Pasal 6

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

## HAK PENYANDANG DISABILITAS

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Hak penyandang disabilitas, meliputi:

- a. hak hidup;
- b. hak bebas dari stigma;
- c. hak privasi;
- d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
- e. hak pendidikan;
- f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. hak kesehatan;
- h. hak politik;
- i. hak keagamaan;
- j. hak keolahragaan;
- k. hak kebudayaan dan pariwisata;
- l. hak kesejahteraan sosial;
- m. hak aksesibilitas;
- n. hak pelayanan publik;
- o. hak perlindungan dari bencana;
- p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
- q. hak konsesi;
- r. hak pendataan;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

#### Pasal 8

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan penyandang disabilitas memiliki hak, meliputi:

- a. hak atas kesehatan reproduksi;
- b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. hak mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. hak untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

#### Pasal 9

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anak penyandang disabilitas memiliki hak, meliputi:

- a. hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. hak pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Bagian Kedua

### Hak Hidup

#### Pasal 10

Hak hidup untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. hak atas penghormatan integritas;
- b. hak tidak dirampas nyawanya;
- c. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

## Bagian Ketiga

### Hak Bebas Dari Stigma

#### Pasal 11

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

## Bagian Keempat

### Hak Privasi

#### Pasal 12

Hak privasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- c. hak penghormatan rumah dan keluarga;
- d. hak mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 13

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. hak diakui sebagai subjek hukum;
- c. hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

#### Bagian Keenam

#### Hak Pendidikan

#### Pasal 14

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. hak mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

#### Bagian Ketujuh

#### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 15

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. hak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. hak mendapatkan program kembali bekerja;
- f. hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Bagian Kedelapan

### Hak Kesehatan

#### Pasal 16

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. hak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. hak memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. hak memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

## Bagian Kesembilan

### Hak Politik

#### Pasal 17

Hak politik untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



- dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
  - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;
  - f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
  - g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa; dan
  - h. memperoleh pendidikan politik.

#### Bagian Kesepuluh

#### Hak Keagamaan

#### Pasal 18

Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:

- a. hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. hak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. hak berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

#### Bagian Kesebelas

#### Hak Keolahragaan

#### Pasal 19

Hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi:

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- a. hak melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. hak mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. hak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. hak memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. hak memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. hak menjadi pelaku keolahragaan
- h. hak mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. hak meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

## Bagian Kedua Belas

### Hak Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 20

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi:

- a. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. hak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. hak mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

## Bagian Ketiga Belas

### Hak Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 21

Hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas sebagaimana

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Bagian Keempat Belas

##### Hak Aksesibilitas

##### Pasal 22

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, meliputi:

- a. hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

#### Bagian Kelima Belas

##### Hak Pelayanan Publik

##### Pasal 23

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi:

- a. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. hak pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

#### Bagian Keenam Belas

##### Hak Perlindungan dari Bencana

##### Pasal 24

Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. hak mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- c. hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. hak mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas  
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi  
Pasal 25

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p, meliputi:

- a. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. hak bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas  
Hak Pendataan  
Pasal 26

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r, meliputi:

- a. hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas  
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat  
Pasal 27

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s, meliputi:

- a. hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. hak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. hak mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

## Bagian Kedua Puluh

### Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

#### Pasal 28

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t, meliputi:

- a. hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Bagian Kedua Puluh Satu  
Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan  
Pasal 29

Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u, meliputi:

- a. hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. hak memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. hak keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan,  
dan Eksploitasi  
Pasal 30

Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v, meliputi:

- a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

BAB V  
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 32

- (1) Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. perencanaan jangka panjang;
  - b. perencanaan jangka menengah; dan
  - c. perencanaan jangka pendek.

Pasal 33

- (1) Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dituangkan ke dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka menengah,

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dituangkan ke dalam RADPD untuk periode 5 (lima) tahun.

- (3) Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Hukum

#### Pasal 35

Pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

#### Pasal 36

Pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



- b. pengenalan tindak pidana; dan
- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

#### Bagian Keempat

#### Pendidikan

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (4) Pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

#### Pasal 41

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompen satori;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

#### Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi di daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas.
- (2) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dan mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas;
  - b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak;
  - c. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas;
  - d. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
  - e. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
  - f. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

#### Pasal 44

Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas di pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui:
- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan lembaga penyelenggara pendidikan di daerah yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan seluruh lembaga penyelenggara pendidikan dapat menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- (5) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Pekerjaan dan Kewirausahaan

## Pasal 47

Pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

## Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

## Pasal 49

- (1) Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:
  - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
  - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
  - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
  - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- (2) Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
  - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
  - c. menyediakan waktu istirahat;
  - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
  - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
  - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 50

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

#### Pasal 51

- (1) Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Pasal 52

Pemberi kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

## Pasal 53

Pemerintah daerah wajib menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan nasional di bidang ketenagakerjaan.

## Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 55

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki unit layanan disabilitas.
- (2) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas untuk:
  - a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
  - e. mengoordinasikan unit layanan disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas.
- (5) Pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



Bagian Keenam

Kesehatan

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 59

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia,

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 64

Rumah Sakit Jiwa maupun Rumah Sakit Umum di Daerah yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan standar.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

#### Pasal 65

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien penyandang disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 66

Segala tindakan medik kepada pasien penyandang disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

#### Pasal 67

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

### Bagian Ketujuh

#### Politik

#### Pasal 71

Pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa, termasuk:

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa.

#### Bagian Kedelapan

#### Keagamaan

#### Pasal 72

Pemerintah daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

### Pasal 73

Pemerintah daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas.

### Pasal 74

Pemerintah daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

### Pasal 75

Pemerintah daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

### Pasal 76

Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan. Bagian Kesembilan Keolahragaan

### Pasal 77

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

### Pasal 78

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Kebudayaan dan Pariwisata  
Pasal 79

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, pemandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 80

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
- b. pengembangan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

#### Pasal 82

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. habilitasi dan rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Pasal 85

Pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).

### Paragraf 2

#### Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

## Pasal 86

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. bimbingan mental spiritual;
  - d. bimbingan fisik;
  - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - f. pelayanan aksesibilitas;
  - g. bantuan dan asisten sosial;
  - h. bimbingan resosialisasi;
  - i. bimbingan dan pembinaan kewirausahaan;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

### Paragraf 3

#### Jaminan Sosial

## Pasal 87

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b diberikan oleh pemerintah daerah bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4  
Pemberdayaan Sosial  
Pasal 88

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.

Paragraf 5  
Perlindungan Sosial  
Pasal 89

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 89 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Belas

### Infrastruktur

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.

#### Paragraf 2

#### Bangunan Gedung

#### Pasal 92

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93

- (1) Pemerintah daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 94

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 3

Jalan

#### Pasal 95

- (1) Jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Penyandang Disabilitas.

- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pertamanan dan Pemakaman

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 5

#### Permukiman

#### Pasal 98

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Milik Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Belas

### Pelayanan Publik

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik di daerah.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.
- (4) Pelayanan jasa transportasi publik di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (5) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 100

- (1) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100, diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Belas Perlindungan dari Bencana

## Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas pada tahap:
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat;
  - c. pasca bencana.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

## Pasal 103

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

#### Pasal 104

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

#### Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Belas

##### Konsesi

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 107

Pemerintah daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 108

- (1) Pemerintah daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Belas

#### Pendataan

#### Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 110

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



pemerintahan di bidang sosial.

- (4) Dalam hal diperlukan, bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 111

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

##### Paragraf 1

##### Komunikasi

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

##### Paragraf 2

##### Informasi

#### Pasal 113

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Pasal 114

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 115

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas

Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 116

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

**BAB VI**  
**AKSESIBILITAS**

**Pasal 117**

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

**Pasal 118**

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

**Pasal 119**

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemudahan dalam hal:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

#### Pasal 120

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;  
dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

#### Pasal 121

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan peran disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan di daerah.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (5) Pemerintah daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (6) Pemerintah daerah memberikan dispensasi/diskresi usia di atas batas yang ditentukan sebagai persyaratan kerja disabilitas.
- (7) Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan disabilitas dalam semua kegiatan pemerintahan desa.
- (8) Pemerintahan desa wajib membentuk rumah dan keluarga yang ramah disabilitas.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

BAB VIII  
KOORDINASI

Pasal 123

- (1) Pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 124

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. badan hukum atau usaha, dan lembaga negara di daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
  - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 125

- (1) Pemerintah daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat harus hadir untuk menangani warganya yang disabilitas mental dan menerima kaum disabilitas mental yang dikembalikan ke keluarga.
- (4) Dinas kesehatan ada di tingkat desa, dan petugas kesehatan yang ada di wilayah desa harus memperhatikan pasien yang pasca pasung, dengan membentuk posyandu bagi orang disabilitas mental.
- (5) Guna rehabilitasi kaum disabilitas, harus dibentuk layanan terpadu bagi kaum disabilitas di masing-masing desa, menyediakan sumber daya ahli, penyediaan SDM tenaga terapis dengan menggunakan anggaran desa.

**BAB XI**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 126**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 127

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 128

- (1) Pemberi Kerja di daerah yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha

Pasal 129

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung Pemerintah dan Swasta yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 130

Penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 131

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2023

BUPATITRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

EDY SOEPRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023  
NOMOR XXXX NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR XXXX/2023

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR XX TAHUN 2023  
TENTANG DISABILITAS

I. UMUM

Bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan salah satu implementasi hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri semua manusia secara universal, termasuk para penyandang disabilitas, dimana pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dan/atau masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas yang selama ini masih banyak diperlakukan secara diskriminatif sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada umumnya.

Saat ini belum terdapat produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, oleh karena itu upaya untuk mewujudkan dan mengimplementasikan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga pemerintah daerah memandang perlu untuk menyusun dan merumuskan norma pengaturan berkaitan dengan disabilitas.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Jangkauan pengaturan regulasi mengenai disabilitas yang melalui penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam peraturan daerah ini, meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komisi disabilitas daerah, pendanaan, dan penghargaan, dan ketentuan sanksi baik sanksi administratif, maupun sanksi pidana.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan adanya produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai disabilitas, diharapkan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya dalam rangka meningkatkan dan melindungi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Huruf j

Cukup jelas.

#### Huruf k

Cukup jelas

### Pasal

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif”

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas

#### Pasal 16

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c  
Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif”

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

adalah komunikasi dengan menggunakan alat bantu.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal. Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”, antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.
- Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Ayat (1)

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat non kesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (1)  
Huruf a  
Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan”

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan. Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	



- Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Ayat (1)  
Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara lain pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum. Huruf d  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	

Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.  
Pasal 133  
Cukup jelas.  
Pasal 134  
Cukup jelas.  
Pasal 135  
Cukup jelas.  
Pasal 136  
Cukup jelas.  
Pasal 137  
Cukup jelas.  
Pasal 138  
Cukup jelas.  
Pasal 139  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR XXXX

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Ketua Komisi IV	